

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Rasji, Ezra Zesika Simbolon, Veren Kasslim

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Rasji

Abstract

The 2024 Presidential and Vice Presidential Election (Pilpres) in Indonesia faced a number of disputes over the results which were then resolved by the Constitutional Court (MK). This dispute resolution process is crucial in maintaining the legitimacy and integrity of the democratic process in this country. The Constitutional Court, as the guardian of the constitution, has an important role in upholding justice and truth in every presidential election dispute. This article discusses the regulations for handling disputes over presidential election results by the MK, the challenges faced by the MK, and the process of resolving the 2024 Presidential PHPU dispute by the MK. The conclusion of the dispute resolution emphasizes the importance of the Constitutional Court's role as guardian of the constitution in ensuring justice, integrity and legitimacy of the democratic process in Indonesia. Suggestions for resolving disputes over presidential election results in the future are to strengthen the independence, transparency and accountability of the Constitutional Court, as well as increasing cooperation between the Constitutional Court, legislative institutions and the government to ensure that the implementation of the Constitutional Court's decisions is respected and implemented effectively.

Keyword : 2024 presidential election, Constitutional Court, dispute resolution

PENDAHULUAN

Pilpres sejak awal saat ingin dijadwalkan kapan akan dilaksanakan sudah mencuatkan beberapa pro dan kontra, mulai banyak dari rakyat Indonesia yang belum siap lepas dari masa kepemimpinan Jokowi yang dinilai telat mengubah perekonomian di Indonesia juga banyaknya rakyat Indonesia yang masih bingung dan bimbang dengan beberapa jajaran para calon. Bahkan disaat debat presiden dan wakil presiden pun muncul beberapa ketidakyakinan pada pihak prabowo karna dinilai kurang bisa menjadi seorang pemimpin , sedangkan didebat wakil presiden pihak gibran mampu melakukan debat tersebut dengan mudah walaupun beberapa jajaran pendapat memiliki usia yang lebih tua daripadanya didunia politik tapi ia mampu membuat semua rakyat terkesima akan kemampuannya.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 di Indonesia telah memunculkan sejumlah perselisihan hasil yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diselesaikan. Proses penyelesaian sengketa ini menjadi krusial dalam menjaga legitimasi dan integritas proses demokrasi di negara ini. MK, sebagai pengawal konstitusi, memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap sengketa Pilpres.

Menurut Saldi Isra, seorang pakar Hukum Tata Negara, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, yang putusannya bersifat final

dan mengikat.¹ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran MK dalam memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh rakyat dalam Pilpres dihargai dan diakui keabsahannya.

Pada Pilpres 2024, terdapat klaim dan kontestasi yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan data yang dimiliki oleh beberapa pihak peserta pemilu. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Margarito Kamis, mencerminkan pentingnya MK sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi².

Dalam konteks Indonesia, MK berperan sebagai lembaga yang independen dan netral, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan substansial. Seperti yang dijelaskan oleh Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, MK harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti dan fakta yang sah, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan substansial.³

Proses penyelesaian sengketa di MK melibatkan berbagai tahapan mulai dari pengajuan permohonan hingga pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan. MK juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti dan fakta yang sah, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan substansial⁴

Penyelesaian sengketa hasil Pilpres di MK merupakan langkah vital dalam memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan dijadikan dasar dalam menentukan pemimpin negara. Keputusan MK tidak hanya menentukan nasib para calon tetapi juga menegaskan kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini ialah penelitian hukum dengan memakai penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum dengan memakai studi kasus normatif yang dilaksanakan di perpustakaan atau penelitian kepustakaan lainnya dengan memakai dokumen sekunder sederhana. Gunakan penalaran deduktif (cara berpikir yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum dimana sudah terbukti kebenarannya dan menunjuk pada sesuatu yang spesifik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Penanganan Sengketa Hasil Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi

Regulasi penanganan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan pedoman yang ketat mengenai prosedur teknis dan administratif yang harus diikuti selama persidangan. Regulasi ini dirancang

¹ Saldi Isra. (2023). Peran dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. Diakses dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/04/08/141500082/berbagai-hoaks-terkait-sidang-sengketa-hasil-pilpres-2024>.

² Bivitri Susanti. (2024). Gugatan hasil Pilpres 2024, kesempatan MK kembalikan citra dan kepercayaan publik. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php/0/mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2>

³ Mahkamah Konstitusi RI. (2024). Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

⁴ Margarito Kamis. (2023). Pentingnya Transparansi dan Keadilan dalam Proses Demokrasi. Diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/komite-ham-pbb-khawatir-dengan-proses-pemilu-2024-di-indonesia/ar-BB1kJEUS>

untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan transparansi dan keadilan, memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam peraturan ini, MK menegaskan komitmennya untuk memproses sengketa Pilpres dengan cara yang terbuka dan adil. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan awal, hingga pengucapan putusan, diatur secara rinci untuk menghindari kerancuan dan mempercepat proses penyelesaian. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi konflik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa di MK diwujudkan melalui pemberian akses informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus. Sidang-sidang di MK dibuka untuk umum dan seringkali disiarkan langsung, memungkinkan pemantauan oleh masyarakat dan media. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak hanya adil, tetapi juga dipersepsikan sebagai adil oleh masyarakat.

Keadilan dalam penyelesaian sengketa Pilpres oleh MK tidak hanya terbatas pada prosedur yang dijalankan, tetapi juga pada substansi keputusan yang diambil. MK berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Dengan demikian, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan preseden hukum yang dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus di masa depan.

Akhirnya, kepastian hukum yang diberikan oleh MK melalui regulasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan kepercayaan investor. Dengan adanya kepastian proses dan hasil yang adil, MK berkontribusi pada pemeliharaan tatanan demokrasi yang sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif. Regulasi ini, oleh karena itu, tidak hanya penting bagi para kontestan Pilpres, tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Tantangan yang Dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik pasca-pemilihan. Sebagaimana diungkapkan oleh pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, masih terdapat keraguan namun juga harapan terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, MK perlu menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan independen untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran ditegakkan dalam penyelesaian sengketa hasil Pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menghadapi beragam tantangan yang kompleks dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi. Tantangan-tantangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari proses hukum, harmonisasi legislasi, hingga pemahaman masyarakat terhadap konstitusi.

Pertama, MK sering dihadapkan pada tantangan terkait judicial review yang melibatkan pengujian materiil dan formil undang-undang. Tantangan ini tercermin dari keinginan publik yang semakin meningkat untuk melakukan pengujian formil, yang memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)⁵.

⁵ Kusuma, J. (2018). The Reformation of Legal Politics: Judicial Review and the Implementation of Constitutional Court Decisions in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 365–386. doi:10.1017/als.2018.23

Kedua, implementasi putusan judicial review oleh MK seringkali diabaikan oleh DPR dan Presiden, yang merupakan pelaku utama dalam politik hukum legislasi. Hal ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi legislasi melalui putusan MK⁶.

Selanjutnya, MK juga menghadapi tantangan dari segi sosial dan budaya yang berkembang, serta disrupsi teknologi yang semakin merajalela. Salah satu tantangan yang sulit diurai adalah efektivitas pelaksanaan putusan yang telah final dan mengikat, yang sering kali disertai dengan fenomena constitutional disobedience⁷.

Selain itu, MK dihadapkan pada tekanan untuk mempertahankan independensinya dan tidak terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik. MK juga perlu terus memperbaiki hukum acara pengujian undang-undang agar lebih transparan dan memperhatikan hak-hak para pihak yang terlibat dalam kasus⁸.

Tantangan lain yang perlu diatasi oleh MK adalah memasyarakatkan konstitusi. MK harus berupaya menjembatani kesenjangan antara lembaga itu sendiri dengan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan formal. Masyarakat yang hidup berdasarkan aturan sosial yang berlaku di lingkungannya membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstitusi⁹.

Tantangan-tantangan ini menuntut respons yang cermat dan strategis dari MK untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi dengan efektif. Upaya-upaya untuk memperkuat independensi, meningkatkan transparansi, dan mendekatkan diri kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks ini.

Proses Penyelesaian Sengketa PPHU Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi

Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan. MK harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti dan fakta yang sah, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan substansial. Dengan demikian, MK dapat memberikan keputusan yang adil dan akurat dalam menangani sengketa hasil Pilpres, menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting, yang diatur sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024. Tahapan-tahapan tersebut memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan, adil, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

⁶ Silalahi, R. (2017). Challenges of Constitutional Court Decision Implementation by the Legislature: A Case Study of Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 14(1), 35–54. Retrieved from <http://www.journal.ui.ac.id/index.php/ILRev/article/view/6995>

⁷ Wibowo, R. A. (2020). Teknologi, Masyarakat, dan Tantangan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Atas Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kurang Dilaksanakan. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 473–495. doi:10.31078/jk1713-77

⁸ Salim, M. (2019). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Tantangan Penguasa Politik di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 262–284. doi:10.31078/jk1612-100

⁹ Mansyur, M. (2016). Masyarakat Hukum dan Konteks Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 34–44. doi:10.20884/1.jdh.2016.16.1.622

Pertama-tama, tahapan pengajuan permohonan menjadi langkah awal yang harus dilakukan oleh peserta pemilu presiden. Permohonan keberatan atas hasil pemilihan harus diajukan kepada MK dalam waktu tiga hari setelah penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)¹⁰.

Setelah itu, MK akan memeriksa kelengkapan administrasi dari berkas pemohon dan mencatat permohonan ke dalam buku Register Perkara Konstitusi. Selanjutnya, salinan permohonan akan disampaikan kepada termohon dan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan¹¹. Proses berlanjut dengan pemeriksaan pendahuluan, di mana MK akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon¹².

Sidang pleno menjadi tahapan berikutnya, di mana MK akan melangsungkan sidang selama 14 hari untuk mendengarkan argumen dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Sidang ini menjadi forum untuk menyampaikan bukti dan pendapat dari masing-masing pihak yang terlibat¹³.

Akhirnya, pengucapan putusan menjadi momen penting dalam proses penyelesaian sengketa. Putusan atau penetapan perselisihan hasil pemilihan umum dijadwalkan untuk dibacakan pada tanggal tertentu, yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kasus sengketa hasil Pilpres 2024, pengucapan putusan dijadwalkan pada tanggal 22 April 2024¹⁴.

Proses ini secara keseluruhan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Melalui tahapan-tahapan ini, MK berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya peran MK sebagai pengawal konstitusi dalam menjamin keadilan, integritas, dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa yang transparan, adil, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan telah menjadi landasan bagi MK untuk memberikan keputusan yang akurat dan menghormati suara rakyat. Keputusan MK tidak hanya menentukan nasib para calon, tetapi juga memperkuat

¹⁰ Syarat dan Proses Permohonan Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK.
<https://pemilu.tempo.co/read/1835989/syarat-dan-proses-permohonan-sengketa-hasil-pemilu-2024-di-mk>.

¹¹ PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/PKMK%20PHPU%20PILPRES%202024.pdf>

¹² Putusan Dibacakan 22 April, Ini Jadwal Tahapan Lengkap PHPU Pilpres 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7254924/putusan-dibacakan-22-april-ini-jadwal-tahapan-lengkap-phpu-pilpres-2024>.

¹³ Jadwal Lengkap Tahapan Penanganan Sengketa Hasil Pilpres 2024.
<https://www.liputan6.com/news/read/5558765/jadwal-lengkap-tahapan-penanganan-sengketa-hasil-pilpres-2024>.

¹⁴ Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia - Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-pemilihan-umum-di-indonesia-lt653bd05c5525c>.

kedaulatan hukum serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Saran untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di masa mendatang adalah pentingnya untuk terus memperkuat independensi, transparansi, dan akuntabilitas MK sebagai lembaga penegak hukum. MK perlu menjaga komitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap sengketa yang diputuskannya, serta memperhatikan kebutuhan akan pemahaman masyarakat terhadap proses hukum. Selain itu, kerjasama antara MK, lembaga legislatif, dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi putusan MK dihormati dan dilaksanakan secara efektif, sehingga integritas demokrasi Indonesia dapat terjaga dengan baik.

MK sendiri harus bersiap menangani perkara sengketa pemilu legislatif, tahapan penanganan perkaranya telah diatur dalam peraturan MK no 1 Tahun 2024 tentang tahapan ,Kegiatan ,dan jadwal penanganan perkara PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam proses menangani kasus ini mk harus melibatkan pendengaran. Pengumpulan beberapa bukti, dan pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan putusan pada akhirnya

Pihak pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keputusan komisi pemilihan umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, DPD,DPRD provinsi, dan DPRD kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024. Bila gibran didiskualifikasi oleh pihak MK maka itu diakan berdampak buruk pada karir prabowo karna masa kepemimpinannya tetap berjalan hanya saja ia ia harus mencari pengganti gibran sebagai wakilnya agar dapat membantunya mengurus kenegaraan

DAFTAR PUSTAKA

- Bivitri Susanti. (2024). Gugatan hasil Pilpres 2024, kesempatan MK kembalikan citra dan kepercayaan publik.Diaksesdari <https://www.mkri.id/index.php/0/mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2>.
- Jadwal Lengkap Tahapan Penanganan Sengketa Hasil Pilpres 2024. <https://www.liputan6.com/news/read/5558765/jadwal-lengkap-tahapan-penanganan-sengketa-hasil-pilpres-2024>.
- Kusuma, J. (2018). The Reformation of Legal Politics: Judicial Review and the Implementation of Constitutional Court Decisions in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 365–386. doi:10.1017/als.2018.23
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5>.
- Mansyur, M. (2016). Masyarakat Hukum dan Konteks Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), 34–44. doi:10.20884/1.jdh.2016.16.1.622
- Margarito Kamis. (2023). Pentingnya Transparansi dan Keadilan dalam Proses Demokrasi. Diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/komite-ham-pbb-khawatir-dengan-proses-pemilu-2024-di-indonesia/ar-BB1kJEUS>.

- Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia - Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-pemilihan-umum-di-indonesia-lt653bd05c5525c>.
- PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/PKMK%20PHPU%20PILPRES%202024.pdf>.
- Putusan Dibacakan 22 April, Ini Jadwal Tahapan Lengkap PHPU Pilpres 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7254924/putusan-dibacakan-22-april-ini-jadwal-tahapan-lengkap-phpu-pilpres-2024>.
- Saldi Isra. (2023). Peran dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu. Diakses dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/04/08/141500082/berbagai-hoaks-terkait-sidang-sengketa-hasil-pilpres-2024>.
- Salim, M. (2019). Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Tantangan Penguasa Politik di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 262–284. doi:10.31078/jk1612-100
- Silalahi, R. (2017). Challenges of Constitutional Court Decision Implementation by the Legislature: A Case Study of Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 14(1), 35–54. Retrieved from <http://www.journal.ui.ac.id/index.php/ILRev/article/view/6995>
- Syarat dan Proses Permohonan Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK.
<https://pemilu.tempo.co/read/1835989/syarat-dan-proses-permohonan-sengketa-hasil-pemilu-2024-di-mk>.
- Wibowo, R. A. (2020). Teknologi, Masyarakat, dan Tantangan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Atas Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Kurang Dilaksanakan. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 473–495. doi:10.31078/jk1713-77